

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara dengan tingkat populasi penduduk yang besar. Indonesia saat ini memiliki jumlah penduduk mencapai 278 696,2 jiwa dengan tingkat rata – rata pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi yaitu, 1,00 persen pertahunnya (Bps.go.id, 2023). Dengan semakin meningkatnya populasi penduduk ini, harus beriringan pula dengan berkembangnya laju pertumbuhan ekonominya. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian yang lebih mengingat sangat berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian bangsa dan Negara Indonesia itu sendiri.

Jumlah penduduk yang cukup besar dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut, Indonesia memiliki pasar konsumen potensial yang besar. Hal ini dapat sangat mendukung laju pertumbuhan ekonomi bila diarahkan dengan baik. Perhitungan laju pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya seperti yang diungkapkan Yuniarti et al. (2020) bahwasanya tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran memiliki dampak positif yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dikutip dari kadin.id, (2023) UMKM telah berkontribusi dalam penyerapan 97 persen dari total tenaga kerja di unit usaha Indonesia.

Selain itu, UMKM merupakan penyumbang terbesar PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia senilai 61 persen atau setara Rp 9.580 triliun (kadin.id, 2023). Pengaruh besar yang diberikan UMKM inilah yang dapat menjadi salah satu solusi dalam berbagai situasi ekonomi. Menyadari pentingnya UMKM bagi keberlangsungan perekonomian Indonesia perlu dibarengi dengan kebijakan dan regulasi yang tepat. Hal ini karena kebijakan dan regulasi membantu mengatur dan memperkuat peran UMKM agar dapat terus tumbuh dan berkembang.

Surabaya merupakan salah satu kota penyumbang angka UMKM yang cukup besar di Indonesia yaitu sekitar 60ribu lebih ( Setiabudi, 2023). Berdasarkan Data Pemerintah kota Surabaya, tercatat 13.441 UMKM yang tercatat di dinas dan 45.566 UMKM lainnya telah terdaftar di tingkat 31 Kecamatan ( Setiabudi, 2023). Dalam memaksimalkan perkembangan UMKM di Surabaya pemerintah Kota Surabaya telah melakukan berbagai upaya mulai dari mempermudah pembuatan surat – surat penunjang ijin berusaha sampai dengan pembuatan évent – évent yang bertujuan untuk memberi lahan dan mempromosikan UMKM yang berpotensi agar bisa lebih dikenal. Dikutip dari Ghinan Salman (2021), Eri Cahyadi selaku Wali Kota Surabaya meminta Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Surabaya untuk mendampingi UMKM di kota pahlawan dalam pengurusan izin usaha. Eri Cahyadi juga menyampaikan bahwa fungsi dari pendaftaran izin nantinya berhubungan dengan intervensi pemerintah terhadap UMKM itu, yang salah satunya yaitu pemerintah dapat mendeteksi UMKM – UMKM yang ada dari masing – masing bidang.

Pendaftaran Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di era saat ini sudah dipermudah, pelaku usaha dapat mengurus izinnya melalui laman *Surabaya Single Windows* (SSW) yang nantinya akan secara otomatis terhubung ke dalam OSS. Dalam SSW pelaku usaha diwajibkan untuk melengkapi syarat – syarat dan ketentuan yang ada untuk mendapatkan SIUP. Salah satu syaratnya yaitu pelaku usaha harus mencantumkan Neraca Perusahaan. Neraca merupakan elemen laporan keuangan yang ada dalam SAK EMKM dengan fungsi mencatat aset, kewajiban dan modal pada waktu tertentu. Dalam hal ini, pembuatan neraca tentunya harus mengacu pada standar – standar yang sudah ditentukan dalam SAK EMKM. Sehingga, sangatlah penting bagi pelaku usaha untuk memahami dan menerapkan penggunaan SAK EMKM dengan baik dan benar dalam menjalankan usahanya.

Penggunaan laporan keuangan yang diperlakukan dengan baik diharapkan dapat membantu pemilik UMKM untuk menilai keadaan usaha mereka. Informasi yang diperoleh dari penilaian tersebut juga berguna dalam mengambil langkah-langkah penting, serta berperan dalam mendapatkan dukungan finansial dari lembaga keuangan. Sebagai pelaku UMKM harus memahami pentingnya informasi akuntansi untuk meraih sukses dalam berbisnis, terutama dalam konteks UMKM. Data akuntansi yang tersedia mampu menjadi landasan yang tepercaya untuk memperoleh pinjaman dari bank, serta untuk keperluan pelaporan pajak dan keputusan internal perusahaan. Keputusan-keputusan ekonomis yang berkaitan dengan manajemen bisnis, seperti langkah pengembangan pasar atau penetapan harga, juga dapat diperkuat oleh informasi akuntansi yang tersedia (Sutapa, 2020).

Setiap pelaku UMKM harus benar menguasai bagaimana pembuatan serta bagaimana memahami laporan akuntansi tersebut jika melihat begitu pentingnya pembuatan laporan akuntansi dan informasi akuntansi. Akan tetapi dalam praktiknya, sebagian besar UMKM menghadapi tantangan dalam mengadopsi dan memanfaatkan informasi akuntansi dalam operasional bisnis mereka. Hasil penelitian Andhika & Damayanti (2017) menunjukkan bahwa banyak UMKM mengalami kesulitan dalam menerapkan praktik akuntansi dalam aktivitas bisnis mereka. Dampak dari situasi ini adalah bahwa UMKM sering menghadapi hambatan dalam mengakses dukungan keuangan dari lembaga perbankan untuk meningkatkan modal usaha mereka.

Di era digital seperti saat ini, seharusnya bisa membantu UMKM dalam memaksimalkan pengembangan bisnis baik di bidang pemasaran maupun dalam hal pembukuan atau pembuatan laporan keuangannya. Sudah banyak jurnal dan artikel serta buku terkait bagaimana penerapan laporan keuangan yang baik dan benar. Selain itu, juga sudah ada *web* atau situs – situs berbayar yang memberikan pelayanan pembuatan laporan keuangan. Adanya hal ini sebenarnya bisa menjadi solusi bagi pelaku UMKM dalam mengatasi masalah dalam mengadopsi dan memanfaatkan laporan akuntansi dalam bisnisnya. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang enggan belajar dan memahami penerapan akuntansi di dalam bisnisnya. Hal ini tentunya terjadi karena beberapa faktor baik dari tingkat pendidikan maupun pemahaman tentang pentingnya pembuatan laporan akuntansi sehingga berdampak pada kurangnya motivasi untuk belajar dari para pelaku UMKM tersebut.

Pencatatan dan penyusunan laporan keuangan UMKM mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2015. SAK EMKM merupakan bentuk penyederhanaan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

SAK EMKM menunjukkan ciri khasnya melalui berbagai standar yang disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus UMKM. Di antara beberapa yang dapat diidentifikasi adalah jumlah komponen dalam laporan keuangan yang lebih terbatas dibandingkan SAK ETAP, yaitu hanya mencakup laporan laba rugi, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Pengakuan unsur-unsur dalam laporan keuangan didasarkan pada biaya historis, dan penurunan nilai hanya diakui dalam kasus entitas di sektor jasa keuangan. Laporan komparatif dalam SAK EMKM cukup membandingkan dengan satu periode sebelumnya. Selain itu, aset tetap dikurangi nilai dengan menggunakan metode saldo menurun atau garis lurus, tanpa mempertimbangkan nilai residu. Namun, salah satu poin penting adalah peralihan dari basis kas ke basis akrual. Hal ini mengharuskan para pelaku usaha yang sebelumnya menggunakan basis kas untuk mengubah pencatatan mereka ke basis akrual. Perubahan ini penting dalam memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja finansial dan operasional UMKM. SAK EMKM mulai diberlakukan efektif pada tanggal 1 Januari 2018 (Akuntansi, 2020).

Walaupun terdapat berbagai keuntungan dari implementasi SAK ETAP dan SAK EMKM, kenyataannya penerapan keduanya seringkali belum mencapai tingkat optimal secara menyeluruh. Seperti yang di tuliskan Nuvitasari et al., (2019)

menyampaikan bahwa UMKM terkait membuat laporan keuangannya masih sangat sederhana yang belum sesuai dengan laporan keuangan yang ada di SAK EMKM. Prajanto & Septriana (2018) berpendapat bahwa dalam era modernisasi saat ini, banyak UMKM yang masih terbatas pada pencatatan transaksi kas masuk dan keluar, jumlah barang yang diperoleh dan dijual kepada pelanggan, serta informasi tagihan dan kewajiban. Pencatatan ini umumnya belum diatur secara standar atau sesuai dengan prinsip akuntansi yang telah mapan, dalam hal ini SAK EMKM.

Berdasarkan permasalahan – permasalahan yang sudah terjadi, sangat dipahami bahwa penerapan SAK EMKM sangat penting, namun masih banyak pelaku UMKM yang belum bisa menerapkannya. Baik karena kurangnya pengetahuan tentang SAK EMKM maupun sosialisasinya. Selain itu, pemahaman teknologi informasi yang ada di era seperti saat ini juga tidak kalah pentingnya dalam menunjang penggunaan SAK EMKM dalam pembuatan laporan keuangan yang sesuai standar. Pentingnya teknologi informasi lebih lanjut ditegaskan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 pasal 16 ayat 1 huruf (d), yang secara khusus menegaskan peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam aspek desain dan teknologi (RI, 2008).

Permasalahan kurangnya pemahaman akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi yang kurang maksimal, dan minimnya sosialisasi terkait cara pembuatan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM ini, akan menghambat alur pemahaman informasi akuntansi yang bila disertai dengan pengambilan keputusan

yang tidak tepat akan dengan mudah memperburuk kondisi UMKM dan menghambat perkembangan dari UMKM itu sendiri.

Peneliti memilih Kota Surabaya dan Kecamatan Rungkut sebagai wilayah penelitian. Kota Surabaya dipilih karena sangat relevan dengan isu-isu yang telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya. Sementara, Kecamatan Rungkut dipilih karena banyaknya UMKM bidang Kuliner ditempat tersebut, dan di Kecamatan Rungkut juga terdapat beberapa perguruan tinggi yang merupakan salah satu peluang target pasar bagi para pelaku UMKM serta karena peneliti memiliki tempat tinggal dan keberadaan tetap di wilayah tersebut. Dengan memilih area penelitian ini, peneliti merasa memiliki akses yang lebih mudah, dan wilayah ini akan memfasilitasi kelancaran proses penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti merasa tertarik untuk menjalankan penelitian dengan judul sebagai berikut **“Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Teknologi Informasi dan Sosialisasi Terhadap Penerapan SAK EMKM pada Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) (Studi Kasus UMKM di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya)”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan dari penjelasan di atas, dapat di tuliskan dalam bentuk pertanyaan perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah tingkat pendidikan pelaku UMKM berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM ?

2. Apakah pemahaman akuntansi pelaku UMKM berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM dalam Laporan Keuangan UMKM ?
3. Apakah pemahaman teknologi informasi berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM ?
4. Apakah sosialisasi berpengaruh terhadap pemahaman penerapan SAK EMKM ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Didapati dari uraian rumusan masalah yang dituliskan, tujuan penelitian ini dapat di jabarkan sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan dalam penerapan SAK EMKM ;
2. Untuk menguji pengaruh pemahaman akuntansi yang dimiliki pelaku UMKM terhadap penerapan SAK EMKM ;
3. Untuk menguji pengaruh pemahaman teknologi informasi UMKM terhadap penerapan SAK EMKM ;
4. Untuk menguji pengaruh Sosialisasi SAK EMKM terhadap penerapan SAK EMKM.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penyusunan penelitian ini diharapkan mempunyai dan dapat memberikan banyak manfaat bagi penulis maupun pihak – pihak terkait. Adapun lebih spesifiknya manfaat yang diharapkan dengan adanya penulisan ini dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut :

### 1. Manfaat teoritis

- a. Dapat menjadi sumber referensi atau bahan bacaan bagi penelitian selanjutnya;
- b. Memberikan sumbangan pemikiran di dunia akuntansi terkait akuntansi UMKM;
- c. Menjadi referensi dan contoh dalam pengajaran akuntansi EMKM kepada para akademisi yang sedang menuntut ilmu akuntansi khususnya para mahasiswa jurusan akuntansi;
- d. Menjadi sumbangan referensi hubungan sebab akibat yang dihasilkan dari penggunaan *Teori of Planned Behavior* (TPB).

### 2. Manfaat praktis

- a. Dapat menjadi referensi bagi Pemkot Surabaya untuk bahan evaluasi terhadap kebijakan mengenai kewajiban pendaftaran SIUP dan pemberian sosialisasi bagi UMKM khususnya bidang kuliner;
- b. Dapat memberikan sumbangan data bagi Pemkot Surabaya untuk lebih memahami warganya khususnya UMKM;
- c. Dapat memberikan wawasan bagi para pelaku UMKM di Kota Surabaya maupun di kota-kota lain;
- d. Dapat memberikan gambaran bagi Pemerintah Indonesia ketika membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.